KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Seleksi OJK - Uji Kepatutan Calon Belum Dijadwalkan
Tanggal : Selasa, 11 April 2017
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 20

SELEKSI OJK

Uji Kepatutan Calon Belum Dijadwalkan

JAKARTA, KOMPAS — Komisi XI DPR belum menjadwalkan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 14 calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2017-2022.

"Surat (penugasan) belum masuk ke Komisi XI, jadi belum ada agenda apa-apa," kata Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng di Jakarta, Senin (10/4).

Surat penugasan yang dimaksud adalah surat penugasan dari Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Prosedurnya, pertama-tama surat dari presiden diterima Sekretariat Jenderal DPR. Selanjutnya, pimpinan DPR akan membacakan surat tersebut pada rapat paripurna.

Pimpinan DPR kemudian menugaskan Bamus untuk menindaklanjuti surat tersebut. Bamus, melalui surat resmi, lantas menugaskan Komisi XI untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan.

Menurut anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Andreas Eddy Susetyo, pimpinan DPR kemungkinan akan membacakan surat dari presiden perihal pemilihan calon anggota DK OJK periode 2017-2022 pada paripurna Selasa ini.

Andreas menegaskan kembali, Komisi XI DPR belum menyusun jadwal untuk uji kepatutan dan kelayakan. Namun, gambaran besarnya, Komisi XI pertama-tama akan meminta masukan dari industri dan akademisi. Selanjutnya, masukan itu akan dijadikan salah satu bahan untuk merumuskan tantangan OJK pada 2017-2022, sekaligus kriteria DK OJK periode 2017-2022.

Baik Andreas maupun Mekeng mengatakan, Presiden Joko Widodo tentu memiliki preferensi siapa saja yang diharapkan terpilih dari 14 calon anggota DK OJK. Urutan dalam surat bisa jadi mencerminkan hal itu.

Panitia seleksi pada 13 Maret telah merekomendasikan 21 calon anggota DK OJK periode 2017-2022 kepada presiden. Ada tujuh jabatan yang akan diisi. Nama yang diajukan panitia seleksi yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu terdiri atas tiga calon untuk setiap jabatan, dengan peringkat 1-3. Peringkat mencerminkan skor.

Panitia seleksi memastikan, nama-nama yang disampaikan kepada presiden bebas dari catatan negatif Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagaimana disampaikan Sri Mulyani, panitia seleksi mengalokasikan banyak waktu untuk melihat rekam jejak para calon anggota DK OJK itu. Bahkan, panitia seleksi mencoret nama yang tidak direkomendasikan Komisi Pemberantasan Korupsi, serta nama yang menurut catatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memiliki transaksi keuangan yang tidak biasa.

Presiden Joko Widodo menyortir 21 nama itu menjadi 14 calon. Selanjutnya, presiden menyampaikan 14 nama tersebut kepada DPR. Mengacu pada surat yang beredar di kelompok perpesanan di masyarakat, 14 nama tersebut disertai peringkat.

Pemilihan anggota DK OJK 2017-2022 untuk menggantikan DK OJK periode 2012-2017 yang masa tugasnya berakhir pada 23 Juli 2017. (LAS)